

HISTORY OF DEMOCRACY IN THE REIGN OF SOEKARNO

YEAR 1959-1966

Jannatul Hasanah¹

Ridwan Malay²

Tugiman³

History Education FKIP-Riau University

Street Bna Widya Km. 12,5 Pekanbaru

jannatulhasanah@gmail.com

ABSTRACT

Guided democracy is a term for the administration of President Soekarno. Guided democracy liberal democracy begins with a shift in 1945-1959 which was the beginning of the establishment of representative institutions such as the House of Representatives of the people who are representatives of the people.

So the House of Representatives is considered necessary to be a function of the legality of the policies made by the government. Kipah and travel in the political parties of national Indonesia, there is one party that is very dominant role in the movement as well as the Communist Party of Indonesia (PKI). At that time, power was centered in three strengths namely, Soekarno, the military-Army, and PKI. Therefore, to get an idea of the life of political parties during the Guided Democracy, the CPI movement cannot be separated.

Therefore, researchers are interested in knowing more about the system of guided democracy during the Sukarno government in 1959-1966 and then during the Sukarno government policy is through a literature review of research with the title: History of democracy at Soekarno-year reign from 1959 to 1966. The purpose of this study is to determine the history of democracy in the reign of Sukarno year 1959-1966. This research is a descriptive study, the research sought to describe and describe phenomena and events that take place in the field at any given moment, researchers obtained data from various scientific somber aspects studied through literature review. Further Suharsimi Ari Kunto (2000: 309-310) that the descriptive study aimed to describe what it is about a variable, state symptoms.

Democracy in force during the year 1959-1966 is guided democracy, a democratic system in which all decisions and thoughts centered on the country's leaders Sukarno was first announced by President Sukarno in the opening session of the Constituent Assembly on November 10, 1956. While the emergence of democracy at the start of Guided by government policy to disperse Kontituante, then the imposition of democracy guided by President Soekarno.

Keywords : *Guided Democracy Histo*

¹ Jannatul Hasanah. A student of history education study program of FKIP-Riau University

² Drs. Ridwan Malay, M.Hum is a supervisor of history education FKIP-Riau University

³ Drs. Tugiman, M.S is a supervisor of history education FKIP-Riau University

SEJARAH DEMOKRASI PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO

TAHUN 1959-1966

Jannatul Hasanah⁴

Ridwan Malay⁵

Tugiman⁶

Pendidikan Sejarah FKIP- Universitas Riau

Jl. Bna Widya Km. 12,5 Pekanbaru

jannatulhasanah@gmail.com

ABSTRAK

Demokrasi terpimpin adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin berawal dari pergeseran demokrasi liberal pada tahun 1945-1959 yang merupakan awal dari berdirinya berbagai institusi perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan dari rakyat. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dipandang perlu untuk menjadi fungsi legalitas terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Di dalam kiprah dan perjalanan partai-partai politik nasional Indonesia, ada satu partai yang pergerakan serta peranannya sangat dominan yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu, kekuasaan memang berpusat pada tiga kekuatan yaitu, Soekarno, TNI-Angkatan Darat, dan PKI. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai kehidupan partai politik pada masa demokrasi terpimpin, pergerakan PKI tidak dapat dilepaskan.

Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang sistem demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan Soekarno pada tahun 1959-1966 kemudian kebijakan pada masa pemerintahan Soekarno melalui sebuah penelitian tinjauan pustaka dengan judul: Sejarah demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1959-1966.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejarah demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1959-1966. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena dan kejadian yang berlangsung dilapangan pada saat tertentu, peneliti memperoleh data dari berbagai sumber ilmiah tentang aspek yang diteliti melalui kajian pustaka. Lebih lanjut Suharsimi Ari Kunto (2000: 309-310) bahwa penelitian deksriptif bertujuan untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala keadaan.

Demokrasi yang berlaku pada masa tahun 1959-1966 adalah demokrasi Terpimpin, sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yaitu Soekarno yang diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Sedangkan munculnya demokrasi Terpimpin diawali oleh kebijakan pemerintah dengan membubarkan Kontituante, kemudian pemberlakuan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno.

Kata Kunci: Sejarah Demokrasi Terpimpin

⁴ Jannatul Hasanah. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UR

⁵ Drs. Ridwan Malay, M.Hum adalah dosen Pembimbing Pendidikan Sejarah FKIP-UR

⁶ Drs. Tugiman, M.S adalah dosen Pembimbing Pendidikan Sejarah FKIP-UR

PENDAHULUAN

Negara merupakan alat dari suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dengan masyarakat, maka negara mempunyai yang penting yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang timbul dalam masyarakat. Selain itu, negara juga bertugas mengorganisasikan dan mengintegrasikan aktivitas individu/orang perseorangan dan golongan agar dapat mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan (Soelistyati, 1987:60). Dengan demikian apa bila pengorganisasian suatu hubungan masyarakat baik, maka akan semakin baik pula perkembangan suatu bangsa atau negara.

Indonesia merupakan salah satu bangsa dan nagara yang telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945, tentunya juga mengalami perbagai perkembangannya dan perubahan baik secara konstitusi maupun sistem pemerintahan. Sejak awal merdeka bangsa Indonesia telah menganut sistem pemerintahan yang beraliran Domokrasi Perlementer atau liberal, perubahan tersebut ternyata tidak berhenti sampai disitu, pada periode berikutnya Indonesia juga mengalami perubahan yaitu Demokrasi terpimpin, dan seterusnya hingga saat ini.

Penelitian ini membatasi masalah pokok yaitu pada pemerintahan Demokrasi terepimpin. Seperti yang kita ketahui demokrasiterpimpin adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi terpimpin, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi terpimpin adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin bearawali dari pergeseran demokrasi liberal pada tahun 1945 – 1959 yang merupakan awal dari berdirinya berbagai institusi perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan dari rakyat. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dipandang perlu untuk menjadi fungsi legalitas terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian munculnya demokrasi terpimpin juga berawal dari maklumat Moh Hatta sebagai wakil Presiden waktu itu, di mana dalam maklumat tersebut menganjurkan perlunya pembentukan partai-partai, yang ternyata mendapat sambutan luas hingga pada waktu itu lebih kurang 40 partai telah lahir di Indonesia, tetapi pada kenyataannya dalam kondisi yang sedemikian, bukannya menambah suburnya sistem demokrasi di Indonesia, melainkan tambah memperunyam keadaan politik bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan bahwa kabinet-kabinet yang berdiri pada masa itu tidak pernah bertahan hingga sampai dua tahun penuh karena terjadi perombakan-perombakan dengan kabinet yang baru, kemudian menurut penilaian Presiden Soekarno banyaknya partai pada waktu itu dapat menimbulkan penyebab perpecahan bahkan dalam nada pidatonya dia menilai partai itu adalah semacam pertunjukan adu kambing yang tidak bakalan berpengaruh baik bagi Bangsa dan negara.

Dalam pergerakannya, partai politik tidak boleh bertolak belakang dengan konsepsi Soekarno. Penetapan Presiden (Penpres) adalah senjata Soekarno yang

paling ampuh untuk melumpuhkan apa saja yang dinilainya menghalangi jalannya revolusi yang hendak dibawakannya. Demokrasi Terpimpin dianggapnya mengandung nilai-nilai asli Indonesia dan lebih baik dibandingkan dengan sistem ala Barat. Ternyata dalam pelaksanaannya lebih mengarah kepada praktik pemerintahan yang otoriter. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di dalamnya terdiri dari partai-partai pemenang pemilihan umum, dibubarkan. Beberapa partai yang dianggap terlibat dalam pemberontakan sepanjang tahun 1950-an, seperti Masyumi dan PSI juga dibubarkan dengan paksa. Bahkan pada tahun 1961 semua partai politik, kecuali 9 partai yang dianggap dapat menyokong atau dapat dikendalikan, dibubarkan pula. Di dalam kiprah dan perjalanan partai-partai politik nasional Indonesia, ada satu partai yang pergerakan serta peranannya sangat dominan yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu, kekuasaan memang berpusat pada tiga kekuatan yaitu, Soekarno, TNI-Angkatan Darat, dan PKI. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai kehidupan partai politik pada masa demokrasi Terpimpin, pergerakan PKI tidak dapat dilepaskan. (Soebijono, 1997:26).

Dari penjelasan-penjelasan yang ada, maka secara sederhana peneliti dapat menganalisa bahwa terdapat beberapa permasalahan yaitu: dibubarkannya partai politik hasil pemilu oleh Presiden Soekarno, yang dinilai telah melanggar UUD 1945. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang sistem demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan Soekarno pada tahun 1959-1966 kemudian kebijakan pada masa pemerintahan Soekarno melalui sebuah penelitian tinjauan pustaka dengan judul: Sejarah demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1959-1966.

Dalam pelaksanaannya, banyak sekali penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi baik itu dalam kehidupan sehari-hari di keluarga maupun masyarakat.

Permasalahan yang muncul diantaranya yaitu:

1. Supermasi hukum belum berjalan sebagai mana mestinya.
2. Banyaknya perpecahan diakibatkan oleh banyaknya partai politik.
3. Kegijakan pemerintahan menyalahi UUD 1945.
4. Pelaksanaan demokrasi belum sesuai dengan harapan bangsa.
5. Bagaimana sistem demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno.
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul, maka peneliti ini hanya akan membahas tentang: demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1959-1966.

Bertolak dari pembatasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya yaitu: Bagaimanakah sejarah demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1959-1966? Kemudian tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui sejarah demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1959-1966. Untuk mengetahui pengalaman demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1959-1966. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1959-1966. Untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1959-1966.

Sejarah adalah kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kehidupan masa lampau. (<http://www.scribd.com/pengertian-sejarah:1>), sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi Terpimpin ialah sebuah sistem Demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara (Azra, 2003:121). Adaun pemerintahan adalah suatu perserikatan yang menyelenggarakan negara melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial. (Sumarsono, 2005:7)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena dan kejadian yang berlangsung dilapangan pada saat tertentu, peneliti memperoleh data dari berbagai sumber ilmiah tentang aspek yang diteliti melalui kajian pustaka. Lebih lanjut Suharsimi Ari Kunto (2000: 309-310) bahwa penelitian deksriptif bertujuan untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala keadaan.

Selanjutnya untuk mempermudah penelitian ini agar mencapai sasaran seperti yang diharapkan, maka diperlukan suat metode yang tepat, yaitu dengan pendekatan historis. Dari sejarah kita belajar memahami perkembangan masyarakat dan bangsa pada masa yang telah lampau dengan segala kejadian dengan pemikiran yang kritis, melalaui seluruh kejadian itu, dijadikan pedoman bagi peneliti dan penentuan keadaan sekarang serta sikap dan arah kemajuan masa depan.

Analisis mengenai hasil penelitian ini yaitu menceritakan historis atau fakta-fakta yang diperoleh melalui sumber-sumber yang ada, terutama hal-hal yang berkaitan dengan sejarah demokrasi pada masa Soekarno tahun 1959-1966. Lebih lanjut taknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan metode historis dengan data kualitatif, deskriptif tentang demokrasi pada masa pemerinntahan Soekarno. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian imi adalah metode historis, maka data yang dianalisa melalui analisa historis.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 1959-1966

Sistem pemerintahan indonesia pada tahun 1959-1966 adalah demokrasi Terpimpin yaitu sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja yang dicetuskan oleh Soekarno.

Pada masa demokrasi Terpimpin kebebasan partai dibatasi dan Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945 dengan membentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS, DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

Akan tetapi sistem pemerintahan pada masa itu, banyak kalangan menilai telah terjadi penyimpangan-penyimpangan di antaranya:

- a. Kedudukan Presiden berdasarkan UUD 1945 berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden.
- b. Pembentukan MPRS, Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, karena berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR.
- c. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh Presiden.
- d. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri.
- e. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian.
- f. Penataan Kehidupan Partai Politik kedudukan partai dibatasi oleh penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 10. Arah Politik Luar Negeri. (Soedijono, 1997:26-27)

2. Kebijakan Pemerintah pada Masa demokrasi Tahun 1959-1966

a. Kebijakan Ekonomi

Struktur Ekonomi Indonesia pada waktu itu menjurus kepada sistem etatisme, artinya segala-galanya diatur dan dipegang oleh pemerintah. Kegiatan-kegiatan ekonomi banyak diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip ekonomi banyak yang diabaikan. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun meningkat 40 kali lipat. Dari Rp. 60,5 miliar pada tahun 1960 menjadi Rp. 2.514 miliar pada tahun 1965, sedangkan penerimaan negara pada tahun 1960 sebanyak Rp. 53,6 miliar, hanya meningkat 17 kali lipat menjadi Rp. 923,4 miliar . Mulai bulan Januari – Agustus 1966, pengeluaran negara menjadi Rp. 11 miliar, sedangkan penerimaan negara hanya Rp. 3,5 miliar.

Defisit yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Akibatnya menambah berat angka inflasi. Dalam rangka membendung inflasi dan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya tentang penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut.

- 1) Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50.
- 2) Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1000 menjadi Rp. 100.

3) Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000

Usaha Pemerintah ini tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Dekon dinyatakan sebagai dasar ekonomi Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum Revolusi Indonesia. Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara Terpimpin. Dalam pelaksanaannya, Dekon mengakibatkan stagnasi dalam perekonomian Indonesia. Kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok. Pada tahun 1961-1962 harga barang-barang pada umumnya naik 400%. Politik Konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia. (<http://www.scribd.com/doc/83152562/kebijakan-pemerintah-tahun-1956-1965>. diakses 17 Mei 2013)

Pada tanggal 13 Desember 1965 melalui penetapan Presiden No. 27 tahun 1965, diambillah langkah devaluasi dengan menjadikan Uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1. Sehingga uang rupiah baru semestinya bernilai 1000 kali lipat uang lama. Akan tetapi didalam Masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi uang rupiah baru. Akibatnya, tindakan moneter pemerintah menekan inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Pada masa demokrasi Terpimpin ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan oleh pemerintah. Akibatnya pemerintah harus mengadakan peneluaran-pengeluaran yang sangat besar, sehingga harga-harga kebutuhan pokok makin melambung tinggi. Tingkat harga paling tinggi terjadi pada tahun 1965, yaitu sebesar 200%-300% dari tahun sebelumnya, seiring dengan ekspor yang semakin lesu dan impor yang dibatasi karena lemahnya devisa. Dalam rangka pelaksanaan ekonomi Terpimpin, Presiden Soekarno merasa perlu untuk mempersatukan semua bank negara kedalam satu bank sentral. Untuk itu dikeluarkan penpres No. 7 Tahun 1965 tentang pendirian Bank Tunggal Milk Negara. Tugas bank tersebut sebagai bank sirkulasi, bank sentral dan bank umum. Untuk mewujudkan tujuan itu maka dilakukan peleburan bank-bank negara Seperti Bank koperasi dan Bank Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan negara, Bank Negara Indonesia kedalam Bank Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Bank Negara Indonesia yang terbagi dalam beberapa unit dengan pekerjaan dan tugas masing-masing.

b. Kebijakan Politik

Demokrasi Terpimpin di Indonesia dimaksudkan oleh Soekarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang berbeda dengan system demokrasi liberal yang merupakan produk dari barat, tetapi

pada pelaksanaannya, demokrasi Terpimpin mengalami bentuk macam penyimpangan.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut diakibatkan oleh terpusatnya kekuatan politik pada Presiden Soekarno. Era tahun 1959 sampai dengan 1966 merupakan era Soekarno, yaitu ketika keijakan-kebijakan Presiden Soekarno sangat mempengaruhi kondisi politik Indonesia. ([http://www.scribd.com/doc/83152562/kebijakan pemerintah tahun 1956-1965](http://www.scribd.com/doc/83152562/kebijakan-pemerintah-tahun-1956-1965). diakses 17 Mei 2013)

1) Pembentukan MPRS

Sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berdasarkan Penpres no.2 tahun 1959. Seluruh anggota MPRS tidak diangkat melalui pemilihan umum, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 3 syarat, yaitu :

- a) Setuju kembali kepada UUD 1945
- b) Setia kepada perjuangan RI
- c) Setuju kepada manifesto politik. (Samodra Wibawa, 2001:131)

Dalam sidang-sidangnya, MPRS telah mengeluarkan beberapa kebijakan penting seperti :

- (1) Penetapan manifesto politik RI sebagai bagian dari GBHN
- (2) Penetapan Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Berencana tahap 1 (1961-1969)
- (3) Menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup

2) Pembentukan DPAS

DPAS dibentuk oleh Presiden Soekarno, dan diketuai langsung oleh Presiden sendiri, dan yang menjadi wakil ketua adalah Ruslan Abdul Gani

3) Pembentukan Kabinet Kerja

Kabinet kerja dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Ir. Juanda sebagai menteri pertama

4) Pembentukan Front Nasional

Front Nasional merupakan lembaga ekstra parlementer yang dibentuk dengan tujuan :

- a) Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia
- b) Melaksanakan pembangunan semesta nasional
- c) Mengembalikan Irian Jaya ke wilayah RI. (Matroji, 2006: 78)

5) Penyederhanaan Partai-partai Politik

Penyederhanaan yang dimaksud adalah pembubaran partai-partai politik yang tidak sesuai dengan Penpres no.7 tahun 1959 ([http://www.scribd.com/doc/83152562/kebijakan pada masa demokrasi Terpimpin](http://www.scribd.com/doc/83152562/kebijakan-pada-masa-demokrasi-terpimpin). diakses 17 Mei 2013)

c. Bidang Sosial Budaya

Indonesia dulunya adalah kerajaan-kerajaan yang tersebar di wilayah Nusantara. Dilatarbelakangi datangnya bangsa barat yang menimbulkan penderitaan, timbul kesadaran bersama untuk bersatu. Wilayah-wilayah yang dulunya terpecah-pecah akhirnya mengikrarkan diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno didampingi Moh. Hatta membacakan teks proklamasi. Sejak saat itu secara resmi Indonesia telah merdeka. Akan tetapi, ternyata kenyataannya tidak demikian, para bangsa imperialisme melancarkan serangan baru yaitu melalui pendekatan budaya. Imperialisme dengan cerdiknyanya menciptakan suatu kultur yang mendukung tujuan mereka, yaitu budaya konsumerisme.

Kurun waktu yang panjang ketika penindasan muncul dan dukung aparatus budayanya, tetulan muncul berbagai perlawanan dan gerakan untuk melawan penindasan tersebut. Perlawanan diekspresikan dalam bentuk gerakan seni budaya. Adapun pembinaan yang dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno diantaranya dengan mengembangkan pribahasa-pribahasa sebagai ekspresi perlawanan terhadap penjajah, pribahasa tersebut misalnya: *nek awan duweke sing nata nak wengi duweke dursila, mutiara asli tetap berkilau, meski ditutupi lumpur kebohongan, berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian.* (Nuraini Soyomukti, 2010:71)

Lebih lanjut Nuraini (2010:8) menjelaskan kebijakan pada bidang sosial dan budaya ditandai dengan munculnya media dan budaya membaca dikalangan rakyat, terutama aktivis, hingga dibangun sekolah modern dan munculnya terbitan-terbitan yang menandai zaman pencerahan. Huruf dan aksara yang ditulis bertujuan untuk membantu rakyat mengembangkan imajinasi terhadap kehidupannya secara modern, selain bacaan-bacaan menambah wawasan dan pengetahuan.

d. Penataan Organisasi Pertahanan dan Keamanan

Penataan ini meliputi digabungkannya TNI dan Polri kedalam satu wadah yaitu ABRI, sehingga dengan demikian ABRI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. TNI berperan penuh dan bertanggung jawab dibidang operasional pertahanan negara. Sedangkan Polri mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat serta penegakan hukum. (yahya, 2005:xxvii)

e. Bidang Hukum

Perkembangan dibidang hukum telah terlihat pada masa pemerintahan presiden Soekarno salah satu contoh adalah mengenai dasar hukum yang dekrip Presiden 5 Juli 1959. Susilo Suharto (2006:82) menjelaskan bahwa dasar hukum yang dijadikan presiden Soekarno di antaranya:

1) Hukum Material

Pemerintah menyelenggaraan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa berusaha supaya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang

dan peraturan-peraturan dijalankan. Di dalam penyelenggaraan tugas ini ternyata mengalami kemacetan, karena kegagalan kontituante membuat UUD menggantikan UUDS 1950, pasal 137. Karena kegagalan menyelenggarakan tugas pemerintah menurut pasal 82 UUDS 1950, maka hal ini merupakan alasan kuat keluarnya Dekrit 5 Juli 1959.

2) Hukum Formil

Atas dasar urusan-urusan pemerintah, peradilan, perundangan-undangan yang semata-mata menjadi tanggung jawab Presiden sendiri dan bukan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab presiden bersama-sama kabinet atas nama Dewan Perwakilan Rakyat, dinyatakan bahwa Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dalam tertib hukum Indonesia, menurut UUDS 1950, mendapat tempat sebagai tindakan kebijaksanaan pemerintah yang dilakukan presiden atan tanggung jawabnya sendiri, berdasarkan pasal 82 UUDS 1950, untuk melepaskan masyarakat dari belenggu ikatan UUDS 1950 yang telah kehilangan tujuannya karena membahayakan kehidupan bangsa. (Susilo Suharto, 2006:82)

3. Akhir dari Demokrasi Terpimpin

Akhir demokrasi terpimpin yaitu ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah sebelas maret (Supersemar) dari presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto. Supersemar tersebut memberikan kekuasaan penuh kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Pemberian kekuasaan penuh itu ternyata membawa rezim Soekarno pada keruntuhan, dan sebaliknya membuka kesempatan bagi Soeharto untuk membangun rezim baru. (Matroji, 2006:130). Lebih lanjut Wisnu Aji (2010:17) menjelaskan bahwa Supersemar memang pernah ditulis oleh presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1965. Kemudian dengan berakhirnya demokrasi Terpimpin kehidupan bangsa Indonesia memasuki babak yang baru yang dengan dimulainya masa Orde Baru.

Runtuhnya orde lama terjadi melalui mekanisme konstitusional, MPRS ketika itu mencabut kepercayaannya terhadap Presiden Soekarno. Dengan demikian lengsernya Soekarno bukan karena kp militer terselubung yang dilakukan TNI. Lebih lanjut surat perintah sebelas Maret 1966 (Supersemar), adalah keputusan politik untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu (Wisnu Aji, 2010:10).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai sejarah demokrasi pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1959-1966 yaitu : demokrasi yang berlaku pada masa tersebut adalah demokrasi Terpimpin, sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yaitu Soekarno yang diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Sedangkan munculnya demokrasi Terpimpin diawali oleh kebijakan pemerintah dengan membubarkan Kontituante, kemudian pemberlakuan

demokrasi Terpimping oleh Presiden Soekarno didasari oleh beberapa pertimbangan di antaranya:

1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa Demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
2. Dari segi perekonomian: Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa Demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
3. Dari segi politik: Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Bertolak dari kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian di atas, demokrasi pada tahun 1959-1966 yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada pembaca hendaknya hasil penelitian ini dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan demokrasi
2. Segala informasi yang di dapat dari penelitian ini hendaknya jangan diterima begitu saja, galilah informasi lebih dalam karena sejarah merupakan kajian yang luar dan memiliki banyak sumber yang dengan sudut pandang yang berbeda.

SARAN

Bertolak dari kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian di atas, demokrasi pada tahun 1959-1966 yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada pembaca hendaknya hasil penelitian ini dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan demokrasi
2. Segala informasi yang di dapat dari penelitian ini hendaknya jangan diterima begitu saja, galilah informasi lebih dalam karena sejarah merupakan kajian yang luar dan memiliki banyak sumber yang dengan sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Wisnu Aji. 2010. *Kudeta Supersemar*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Asshiddie, Jimly. 2006. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Kunstitusi Press. Jakarta
- Azra, Azyumardi. 2003. *demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Crouch, Herbert. 1999. *Militer & Politik di Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta
- Dedi Supriyadi. 2007. *Sejarah Hukum Islam*. Pustaka Setia. Bandung
- Djamhari, Saleh, dkk. 1997S. *Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966*. CV. Putra Sejati Raya. Jakarta
- Feith, Herbert. 1995. *Soekarno-Militer dalam demokrasi Terpimpin*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Inu Kencana. 2002. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Jimly Asshiddigie. 2006. *Kemerdekaan Serikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Pers
- Karim, Rusli. 1993. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta
- Matroji. 2006. *Sejarah*. Erlangga. Jakarta
- Mohammad Hatta. 2008. *Demokrasi Kita*. Bandung: Segarsy
- Muhammad, Yahya. 2005. *Perkembangan Militer dalam Perkembangan Politik di Indonesia 1945-1966*. Gadjah Mada Universiti Press. Yogyakarta
- Ni'matul Huda. 2012. *Ilmu Negara* Jakarta: Rajawali Pers
- Soyomukti Nuraini. *Soekarno Visi Kebudayaan & Revolusi Indonesia*. Ar-Ruzz Media. Jokjakarta
- Ramayulis. *Ilmu Pedidikan Islam*. Kalam Mulia. Jakarta

- Ricklefs. 2007. *Sejarah Indonesia Modern*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Samodra Wibawa. 2001. *Negara-negara di Nusantara*. Yogyakarta: UGM
- Simanjuntak, PHH (2003) *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform era)*. Djambatan. Jakarta.
- SJ. Wardaya, Baskara. 2001. *Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Soebijono. 1997. *Dwifungsi ABRI*. Yogyakarta: UGM
- Soelistyati. 1987. *Pengantar Ilmu Politik*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sumarsono. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Susilo Suharto. 2006. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*. Graha Ilmu.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Etika Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Yahya A. Muhaimin. 2005. *Perkembangan Militer dalam Molitik di Indonesia 1945-1988*. UGM. Yogyakarta
- Wibawa, Samodra. 2001. *Negara-negara Di Nusantara*. Gadjah Mada Universiti Press. Yogyakarta
- Wisnu Aji, Achmad. 2010. *Kudeta Supersemar*. Ar-Ruzz Media Group. Jokjakarta